

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL BERBASIS PPEPP DALAM PENDIDIKAN TARUNA AKADEMI MILITER

Agung Prapsetyo

Prodi Teknik Sipil Pertahanan Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah
kinggoenk@gmail.com

Kiki Lestari

Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Sumatera Utara
kikilestari569@yahoo.com

Tentrem Raharjo

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
095.dikreglx@gmail.com

Suparyana

Prodi Teknik Mesin Pertahanan Akademi Militer Magelang
suparyana@mesinhan.akmil.ac.id

Abstract

The reform of the higher education quality assurance system through the Minister of Education and Science and Technology Regulation Number 39 of 2025 emphasizes the importance of implementing an Internal Quality Assurance System (SPMI) based on the Determination, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement (PPEPP) cycle. In the context of military higher education, the implementation of SPMI has additional complexity because it must integrate academic education, professional training, and leadership character development. This study aims to formulate a systemic and sustainable SPMI implementation model based on PPEPP to meet and exceed the National Standards for Higher Education. The method used is a normative-conceptual study based on regulatory analysis and open access international quality literature. The results of the study indicate that successful implementation is determined by the integration of quality culture, strategic leadership, a data-based evaluation system, and a continuous quality improvement mechanism. The resulting integrative conceptual model of the military SPMI, which is adaptive to the dynamics of defense and developments in educational technology, is relevant to supporting and maintaining the achievement of superior accreditation at the Military Academy educational institution.

Keywords: SPMI, PPEPP, Military Academy education, quality, SN Dikti.

Abstrak

Reformasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan pentingnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dalam konteks pendidikan tinggi militer, penerapan SPMI memiliki kompleksitas tambahan karena harus mengintegrasikan pendidikan akademik, pelatihan profesional, dan pengasuhan karakter kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model implementasi SPMI berbasis PPEPP yang sistemik dan berkelanjutan guna memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-konseptual berbasis analisis regulasi dan literatur mutu internasional *open access*. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh integrasi budaya mutu, kepemimpinan strategis, sistem evaluasi berbasis data, serta mekanisme *continuous quality improvement*. Model konseptual integratif SPMI militer yang adaptif terhadap dinamika pertahanan dan perkembangan teknologi pendidikan yang dihasilkan relevan untuk mendukung dan mempertahankan pencapaian akreditasi unggul di institusi pendidikan Akademi Militer.

Kata Kunci: SPMI, PPEPP, pendidikan Akademi Militer, mutu, SN Dikti.

LATAR BELAKANG

Pendidikan Akademi Militer merupakan bagian strategis dari sistem pertahanan negara karena berperan dalam menyiapkan perwira profesion sebagai sarjana pernerapan bidang pertahanan (A. Prapsetyo et al., 2022; yang memiliki kompetensi akademik, kepemimpinan, dan integritas moral serta sebagi sumber Daya Pertahanan Negara (N.A.J.S. Prapsetyo et al., 2023) Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mutu pendidikan tinggi dijamin melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Reformasi kebijakan terbaru melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 semakin menegaskan bahwa SPMI harus dilaksanakan secara sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Pendekatan PPEPP sejalan dengan prinsip continuous quality improvement dalam teori manajemen mutu modern. Deming (1986) melalui konsep PDCA menyatakan bahwa organisasi yang berkelanjutan harus mengintegrasikan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan secara konsisten. Prinsip tersebut diperkuat dalam standar ISO 9001:2015 yang menekankan risk-based thinking dan evidence-based decision making (ISO, 2015). Dalam konteks pendidikan tinggi global, penjaminan mutu tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai transformasi institusional (Harvey & Green, 1993). Studi Schindler et al. (2015) menunjukkan bahwa mutu pendidikan tinggi harus diukur melalui kombinasi input, proses, output, dan outcome. European Association for Quality Assurance in Higher Education (2015) juga menekankan bahwa internal quality assurance harus menjadi bagian dari budaya organisasi.

Tantangan implementasi SPMI dalam pendidikan militer terletak pada integrasi tiga dimensi utama: pendidikan akademik berbasis keilmuan, pelatihan profesional berbasis kompetensi operasional, serta pengasuhan karakter berbasis nilai-nilai kepemimpinan militer. Ketiga dimensi tersebut harus dikelola dalam satu sistem mutu terpadu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang berhasil membangun budaya mutu memiliki kepemimpinan transformasional yang kuat (Nguyen et al., 2020), sistem evaluasi berbasis data (Stensaker et al., 2019), serta partisipasi kolektif seluruh pemangku kepentingan (Bollaert, 2014). Namun, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan model PPEPP dengan karakteristik pendidikan militer masih terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan merumuskan model implementasi SPMI berbasis PPEPP yang integratif dan adaptif bagi institusi pendidikan militer guna memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan analisis kebijakan dan studi literatur sistematis. Dengan sumber data diperoleh dari:

1. Regulasi nasional (UU, Permendiktisaintek 39/2025, Peraturan BAN-PT 2025)
2. Literatur mutu pendidikan tinggi *open access* (2015–2024)
3. Standar internasional (ISO 9001:2015; ESG 2015)

Analisis dilakukan melalui:

1. *Content analysis* terhadap regulasi
2. *Comparative analysis* dengan standar internasional
3. Sintesis model integratif berbasis PPEPP

HASIL

1. Kerangka Regulatori Implementasi SPMI

Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa SPMI merupakan kewajiban institusional yang dilaksanakan melalui siklus PPEPP. Siklus ini harus menjamin pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan militer, implementasi PPEPP harus diterapkan pada:

1. Standar pendidikan
2. Standar penelitian
3. Standar pengabdian
4. Standar sumber daya manusia
5. Standar sarana prasarana
6. Standar tata kelola

2. Tahap Penetapan

Tahap penetapan mencakup perumusan kebijakan mutu dan CPL berbasis KKNI serta kebutuhan operasional militer. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan standar meningkatkan efektivitas implementasi mutu (Martin & Parikh, 2017).

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan melalui integrasi OBE, pelatihan taktis, dan sistem pengasuhan karakter. Studi Proitz et al. (2017) menekankan bahwa alignment antara kurikulum dan learning outcomes menjadi faktor kunci mutu.

4. Tahap Evaluasi dalam Sistem PPEPP Pendidikan Akademi Militer

Tahap evaluasi dalam siklus PPEPP merupakan fase krusial yang menentukan efektivitas keseluruhan sistem penjaminan mutu. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme refleksi institusional. Dalam Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 ditegaskan bahwa evaluasi harus berbasis bukti (evidence-based) dan terukur melalui indikator kinerja yang sistematis.

Dalam konteks pendidikan militer, evaluasi dilaksanakan melalui beberapa mekanisme utama:

a. Audit Mutu Internal (AMI).

AMI dilakukan secara periodik untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan efektivitas pelaksanaan program. Stensaker et al. (2019) menyatakan bahwa audit internal yang berbasis pembelajaran organisasi mampu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan mutu secara signifikan.

b. Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pengukuran CPL dilakukan melalui asesmen kompetensi akademik, evaluasi kinerja pelatihan, serta penilaian kepemimpinan. Studi Proitz et al. (2017) menunjukkan bahwa alignment antara learning outcomes dan assessment strategy merupakan faktor kunci dalam menjaga mutu pembelajaran.

c. Evaluasi Kinerja Lulusan oleh Satuan Pengguna.

Dalam pendidikan militer, umpan balik dari satuan operasional menjadi indikator penting relevansi lulusan. Konsep *stakeholder-oriented quality assurance* (Bollaert, 2014) menekankan pentingnya keterlibatan pengguna lulusan dalam sistem evaluasi mutu.

d. Analisis Data Berbasis Sistem Informasi Mutu.

Digitalisasi sistem mutu memungkinkan monitoring indikator secara real-time. Kehm (2016) menegaskan bahwa *governance* berbasis data meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendidikan tinggi.



Evaluasi dalam pendidikan militer harus mencakup dimensi akademik, profesional, dan karakter. Integrasi ketiga dimensi ini membedakan model mutu militer dari model mutu perguruan tinggi umum.

5. Tahap Pengendalian dan Manajemen Risiko

Tahap pengendalian dalam PPEPP berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap temuan evaluasi. ISO (2015) menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko (*risk-based thinking*) dalam manajemen mutu modern. Dalam pendidikan militer, pengendalian dilakukan melalui:

- Analisis akar masalah (*root cause analysis*)
- Penetapan tindakan korektif dan preventif
- Monitoring efektivitas perbaikan
- Revisi kebijakan jika diperlukan

Studi Martin dan Parikh (2017) menunjukkan bahwa organisasi pendidikan yang menerapkan risk management dalam quality assurance memiliki tingkat keberlanjutan mutu yang lebih tinggi. Selain itu, pendekatan *governance modern* menuntut transparansi dalam proses pengendalian. OECD (2019) menegaskan bahwa akuntabilitas berbasis data meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

6. Tahap Peningkatan dan *Continuous Quality Improvement*

Tahap peningkatan merupakan inti dari budaya mutu berkelanjutan. Deming (1986) menegaskan bahwa peningkatan kualitas bukan proyek jangka pendek, melainkan proses sistemik. Dalam pendidikan militer, peningkatan dilakukan melalui:

- Revisi kurikulum berbasis dinamika pertahanan global
- Peningkatan kualifikasi dosen dan instruktur
- Integrasi teknologi pembelajaran digital
- Penguatan riset pertahanan

Studi Nguyen et al. (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan continuous improvement dalam institusi pendidikan. Lebih lanjut, ESG 2015 menekankan bahwa internal quality assurance harus berorientasi pada pengembangan institusional, bukan sekadar kepatuhan administratif (ENQA, 2015).

7. Model Integratif SPMI Pendidikan Militer

Berdasarkan sintesis literatur dan regulasi, artikel ini mengusulkan Model Integratif SPMI Pendidikan Militer berbasis lima pilar:

- Pilar Akademik (OBE & CPL Alignment)
- Pilar Pelatihan Profesional (Kompetensi Operasional)
- Pilar Pengasuhan Karakter (Leadership & Integrity)
- Pilar Tata Kelola & Manajemen Risiko
- Pilar Evaluasi Berbasis Data & Digitalisasi

Kelima pilar ini diintegrasikan dalam siklus PPEPP yang berjalan minimal dalam horizon tiga tahunan untuk menunjukkan tren peningkatan mutu. Model ini memperluas pendekatan mutu tradisional dengan memasukkan dimensi kepemimpinan militer sebagai outcome utama.

8. Sintesis Literatur Penjaminan Mutu (2015–2024)

Tabel berikut merangkum kontribusi 45 literature mutakhir terkait *quality assurance*:

Tabel 1. Sintesis Literatur Mutu Pendidikan Tinggi

Penulis	Fokus Kajian	Kontribusi terhadap SPMI Akmil
Stensaker et al. (2019)	Governance & QA	Audit berbasis pembelajaran



Nguyen et al. (2020)	Leadership & QA	Peran kepemimpinan transformasional
Prøitz et al. (2017)	Learning outcomes	Alignment CPL & asesmen
Kehm (2016)	Data governance	Transparansi mutu
Martin & Parikh (2017)	Risk management	Integrasi manajemen risiko
Bollaert (2014)	Stakeholder QA	Keterlibatan pengguna lulusan

Sumber: Analisis Data, 2026

PEMBAHASAN

Implementasi SPMI berbasis PPEPP dalam pendidikan militer menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan normatif dan praktik operasional. Temuan utama menunjukkan:

- Budaya mutu lebih penting daripada kepatuhan administratif.
- Evaluasi berbasis data meningkatkan efektivitas pengendalian.
- Kepemimpinan strategis menentukan keberlanjutan sistem.
- Integrasi tiga dimensi (akademik, profesional, karakter) menjadi pembeda utama pendidikan militer.

Temuan ini konsisten dengan Harvey dan Green (1993) yang memandang mutu sebagai transformasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi SPMI berbasis siklus PPEPP dalam pendidikan Akademi Militer merupakan pendekatan sistemik yang efektif untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh komitmen kepemimpinan, budaya mutu kolektif, integrasi manajemen risiko, dan evaluasi berbasis data. Model integratif lima pilar yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan sistem mutu di Akademi Militer. Penerapan konsisten dalam siklus minimal tiga tahun dapat mendukung pencapaian status akreditasi unggul serta meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bollaert, L. (2014). *A manual for internal quality assurance in higher education*. EUA.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.
- ENQA. (2015). *Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area (ESG 2015)*.
- Fateh, H. (2025). *Enhancing QA in Higher Education Through Strategic Roles of Libraries and Digital Literacy*. *Gerakan Edukasi Journal*.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.
- ISO. (2015). *ISO 9001:2015 Quality management systems—Requirements*.
- Jarodi, O. (2024). *Ensuring Quality Assurance in Indonesian Higher Education: Challenges and Strategies*. *ISET Proceedings*.
- Kehm, B. M. (2016). Higher education governance reforms. *Studies in Higher Education*, 41(1), 1–14.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). *Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025*.



- Krooi, M. (2024). *Introducing the 3P Conceptual Model of Internal Quality Assurance. Evaluation and Program Planning*.
- Martin, M., & Parikh, S. (2017). Quality management and risk-based thinking in higher education. *Quality Assurance in Education*, 25(3), 327–340.
- Meisuri, M., Harjati, P., & Pahrudin, A. (2024). *Higher Education Quality Assurance System. Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 8(1), 27–44.
- Nguyen, H., et al. (2020). Transformational leadership and quality assurance in higher education. *Higher Education Policy*, 33(2), 231–250.
- Nugroho, K. S. (2025). *Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Era Disrupsi Melalui Digitalisasi Akreditasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Nur Adzidzah & Agus Yudiawan. (2025). *Quality Assurance of Higher Education in the 5.0 Era: Trends and Future Prospects. Journal of Quality Assurance in Islamic Education (JQAIE)*, 5(1), 52–60.
- OECD. (2019). *Education policy outlook 2019*.
- Pham, N. T. T. (2022). *Internal Quality Assurance of Academic Programs: A Case Study on Continuous Improvement in Higher Education. SAGE Open*, 12(4), 21582440221144419.
- Prapsetyo, A., Ahmad, I., Yanto, Y., Saptono, E., & Lestari, K. (2022). Filosofi Arsitektur Pertahanan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 373–388.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.3157>
- Prapsetyo, N. A. J. S., Lestari, K., & Prapsetyo, A. (2023). Implementasi Profesi Bidan Sebagai Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Bela Negara. *Dwija Kusuma*, 11(1), 72–80.
- Prøitz, T. S., et al. (2017). Learning outcomes and assessment. *European Educational Research Journal*, 16(1), 55–72.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Schindler, L., et al. (2015). Definitions of quality in higher education. *Higher Learning Research Communications*, 5(3), 3–13.
- Stensaker, B., et al. (2019). Organisational learning and QA. *Quality in Higher Education*, 25(2), 164–179.
- Supriyanto, S., Rosyanafi, R. J., Ningrum, M. A., & Indrawati, D. (2024). *Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi. Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 10(1), 42–51.
- Tran, C. Ai., et al. (2025). *Research in Higher Education Quality Assurance Worldwide (2003–2023): A Bibliometric Analysis from Scopus. Cogent Education*.
- Yasin, O. P. (2025). *Higher Education Quality in Indonesia Based on QS Southeast Asia Rankings: Policy Implications. YASIN Journal*.